



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

No : 01/SK. Bimbingan Tesis/PPS-UKI/Dir/03.2020

tentang

**Perubahan Personalia Dosen Pembimbing Tesis
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta**

Atas kasih dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi beban studi dalam penyelenggaraan program studi pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta disyaratkan penulisan Tesis sebagai tugas akhir;
b. bahwa mahasiswa peserta Program Magister Ilmu Hukum yang telah memenuhi syarat menyelesaikan Tesis, sudah saatnya untuk mendapat Tim Pembimbing Tesis;
c. bahwa untuk Pembimbing Tesis tersebut perlu ditunjuk Tim Penguji yang memiliki kewenangan dan kemampuan akademik;
d. bahwa oleh adanya permasalahan dalam proses Pembimbing Tesis yang sebelumnya sudah ditunjuk, maka perlu dilakukan perubahan Tim Pembimbing Tesis bagi mahasiswa yang namanya tertera pada lampiran Keputusan ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Rektor No.UN/50/SK.REK.08.2014 tentang Pengangkatan Direktur PPS-UKI.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia tanggal 11 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta;
Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 15 Maret 2019

Direktur,



Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si.

Tembusan:

1. Para Dosen Penguji;
2. Wakil Rektor Non Akademik;
3. Kaprodi MIH-UKI;
4. Peringgal.

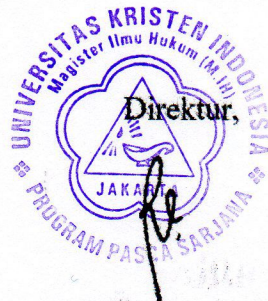
Lampiran :

Nomor : 01/SK. Bimbingan Tesis/PPS-UKI/Dir/03.2020

Tanggal : 15 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING TESIS MIH Genap 2019/2020
Konsentrasi Hukum Ekonomi


No.	Nama Mahasiswa	Judul Tesis	Dosen Pembimbing
1	Dickson M. Pardede NIM: 1802190805	Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Berkaitan dengan Pembatalan Jual Beli Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 2019 Nomor 223 PK /Pdt.Sus-Pailit/2018	1. Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,M.H. (P.1) 2. Dr. Gindo L. Tobing, S.H, M.H. (P2)



Dr. Bintang R. Simbolon, M.Si.

DAFTAR HADIR
UJIAN SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM UKI

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	Dickson Marusaha Pardede	1802190805	

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Dikson Marusaha Pardede

N I M : 1802190805

JUDUL TESIS : Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Beritikad baik
Berkaitan Dengan Pembatalan Jual Beli Berdasarkan
Putusan Actio Paulina (Analisis Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 2019 Nomor 223
PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

HARI/TANGGAL: Selasa, 7 Juli 2020

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	80
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilai lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :	

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

SARAN PERBAIKAN

N A M A : Dikson Marusaha Pardede

N I M : 1802190805

Saran Perbaikan :

- *Filosofi action plan*
.....
-
.....
.....
.....
.....

PENGUJI ,



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERIKTIKAD BAIK
BERKAITAN DENGAN PEMBATALAN JUAL BELI
BERDASARKAN PUTUSAN *ACTIO PAULINA*
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 23 JANUARI 2019 NOMOR 223 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018)**



TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis**

Oleh

**Nama : Dickson Marusaha Pardede, S.H., M.Kn.
NIM : 1802190805**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERIKTIKAD BAIK
BERKAITAN DENGAN PEMBATALAN JUAL BELI
BERDASARKAN PUTUSAN ACTIO PAULINA
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL
23 JANUARI 2019 NOMOR 223 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018)**

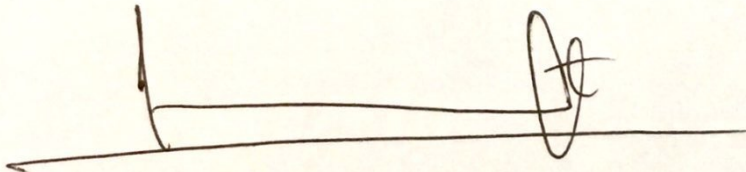
Oleh

**Nama : Dickson Marusaha Pardede, S.H., M.Kn.
NIM : 1802190805**

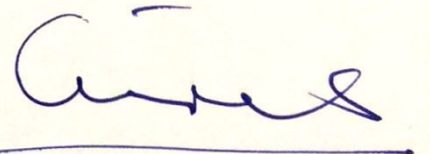
TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Bidang Kajian Utama Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Jakarta, 23 Juni 2020



**Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
Pembimbing 1**



**Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Pembimbing 2**

**Mengetahui,
Kaprodi Magister Hukum UKI**

Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 32/UKI-PPs/MIH/12.2019

Pimpinan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202

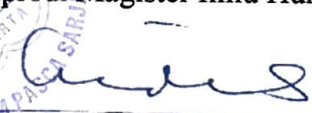
JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana semester ganjil 2019/2020.

Sebagai Pembimbing I , nama mahasiswa :


Johnson Sahat Maruli Tua Nim : 1802190032

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.

Jakarta , 4 Desember 2019
Kaprodi Magister Ilmu Hukum

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR
UJIAN SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM UKI

Hari/Tanggal : Juli 2020

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	Johnson Sahat Maruli Tua	1802190032	

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Johnson Sahat Maruli Tua

NIM : 1802190032

**JUDUL TESIS : Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Paillit Dalam
Hukum Kepaillitan Indonesia**

HARI/TANGGAL: 13 Juli 2020

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	85
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilai lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

SARAN PERBAIKAN

NAMA : Johnson Sahat Maruli Tua

NIM : 1802190032

Saran Perbaikan :

Revisi catatan yg ada di Tesis

PENGUJI,

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

NILAI GABUNGAN 3 PENGUJI

**KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT
DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

Oleh

Johanson Sahat Maruli Tria

1802190052

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum

Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Tahun 2020

**KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT
DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

Oleh

Johnson Sahat Maruli Tua

1802190032

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum

Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Tahun 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Oleh
Johnson Sahat Maruli Tua
1802190032

TESIS
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis
Jakarta, 2020



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Pembimbing 1



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H. M.H., MBA.

Pembimbing 2

Mengetahui,
Kaprodi Magister Ilmu Hukum UKI



Dr. Gindo E.L. Lumban Tobing, S.H., M.H.

**KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM
HUKUM KEPAILITAN INDONESIA**

Oleh

Nama : Johnson Sahat Maruli Tua

Nim : 1802190032

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum

Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Tesis

Telah diuji, Jakarta, 13 Juli, 2020

**Tim Penguji
Ketua**



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H. M.H., MBA.

Anggota



Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.

ABSTRAK

- A. Nama : Johnson Sahat Maruli Tua
B. Nim : 1802190032
C. Judul : Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Pailit Dalam Hukum Kepailitan Indonesia
D. Kata Kunci : kekayaan intelektual, harta, kepailitan

Kekayaan Intelektual dapat berupa hak eksklusif paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang dan hak-hak lain yang menjadi bagian dari rezim kekayaan intelektual. Hak-hak kekayaan intelektual tersebut sering kali menjadi aset yang utama yang dimiliki oleh debitor pailit atau paling tidak menjadi sesuatu yang berharga. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menjelaskan ataupun mengatur secara rinci apakah harta yang dimaksud merupakan harta dalam bentuk benda atau hak kebendaan bahkan hanya mengatur mengenai harta yang dikecualikan atau harta yang tidak dapat dijadikan sebagai harta pailit. Dengan demikian, kurator yang bermaksud untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang tidak berwujud seperti Kekayaan Intelektual selalu kesulitan untuk melakukan penilaian atas harta tersebut. Merupakan hal yang penting untuk mengklasifikasi dan mengklarifikasi penilaian harta pailit dalam bentuk kekayaan intelektual dan juga untuk memahami pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam bentuk kekayaan intelektual oleh kurator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme dalam penilaian Aset Tak Berwujud (*intangible asset*) yang dapat ditetapkan dalam perhitungan nilai objek KI yang menjadi harta pailit dalam perkara kepailitan sehingga selama ini dalam menentukan penilaian digunakan dengan metode penilaian aset tidak berwujud yang terdapat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-620/B1/2011 tentang Pedoman penilai dan Penyajian Laporan Penilai Aset Tak Berwujud di Pasar Modal. Kemudian selama harta pailit memiliki harga/nilai jual yang dibawah penguasaan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP), bila ingin menetapkan KI sebagai harta pailit memerlukan kajian mengenai hukum kebendaan, seperti yang tertuang pada Pasal 499 KUHPerdara. Mengenai apakah semua benda dapat dijadikan penjaminan pembayaran utang, hal itu bergantung pada benda apa yang dipergunakan untuk menjamin benda tersebut. Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit, memerlukan appraisal. Appraisal tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sebagai standar penilaian Indonesia dari suatu harta. Going concern atau asas kelangsungan usaha tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas (badan usaha), dengan adanya asas going concern ini dapat diterapkan Kurator dapat memaksimalkan pemanfaatan KI saat kepailitan adalah dengan cara memanfaatkan KI untuk kelanjutan bisnis perusahaan agar perusahaan pailit (debitor) dapat berjalan seperti sedia kala.

ABSTRACT

- A. Name : Johnson Sahat Maruli Tua
B. Nim : 1802190032
C. Title : *Intellectual Property as Bankrupt Asset in Indonesian Bankruptcy Law*
D. Keywords : *intellectual property, assets, bankruptcy*

Intellectual Property can be in the form of exclusive patents, copyrights, brands, industrial designs, trade secrets and other rights that are part of an intellectual property regime. This exclusive intellectual property is often the main asset owned by the bankrupt debtor or at least something valuable. In relation to that, Law of Republic of Indonesia No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations does not explain nor regulate in detail whether the said assets are assets in the form of objects or material rights, further the law only regulates excluded assets or assets that cannot be made bankrupt assets. Therefore, the receiver who intends to administer and settle the intangible bankrupt assets such as Intellectual Property has always found it difficult to assess the assets. It is important to classify and clarify the valuation of bankrupt assets in the form of intellectual property and also to understand the administration and settlement of bankrupt assets in the form of intellectual property by the receiver. The result of the research shows that there are no laws and regulations governing the mechanism in evaluating intangible assets that could be determined in calculating the value of a IP object that became a bankrupt asset in a bankruptcy case so that so far in determining the valuations, the method of valuing intangible assets contained in the Decree of the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number Kep-620/B1/2011 concerning the Appraisal Guidelines and Presentation of Intangible Asset Appraisers in the Capital Market is used. Then as long as the bankrupt asset has a selling price/value that is under the control of the Curator or the Inheritance Office (BHP), if you want to determine IP as bankrupt asset, it requires a study of material laws (hukum kebendaan), as stated in Article 499 of the Indonesian Civil Code. Regarding whether all objects can be used as security of debt repayment, it depends on what objects are used to secure these objects. Curators in conducting bankruptcy property acquisitions require appraisal. The appraisal is based on recommendations from the Office of Public Appraisal Services (KJPP) as Indonesia's valuation standard for assets. Going concern or the principle of business continuity is not explicitly regulated in the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, is the principle of survival of an entity (business entity), with the existence of this going concern principle, the Curator can maximize the use of IP in bankruptcy by utilizing IP for the continuation of the company's business so that the bankrupt company (debtor) can run as it was before.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kebaikan serta kasih karuniaNya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan dan pemenuhan syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Judul Tesis Penulis adalah “Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia”. Didalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis sangat banyak memperoleh bantuan berupa pengajaran, arahan, bimbingan dari berbagai pihak yang tidak segan untuk memberikan waktu dan pemikiran pemirran bahkan peminjaman buku sebagai referensi penulisan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan capan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Pihak yang membantu penyelesaian Penulisan tesis ini, Dimana dalam situasi yang sangat sulit berkomunikasi saat ini dikarenakan adanya kasus COVID-19 yang menjadi pandemi, akan tetapi semua Pihak terutama para pembimbing dan memberikan semangat yang sangat tinggi kepada Penulis terutama dalam bimbingan, petunjuk, dan arahan yang luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis juga sangat dibantu oleh banyak pihak dalam bentuk semangat, pemikiran dan data-data yang diperlukan, oleh karena itu perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Indonesia, Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. dan sebagai Penguji serta Pembimbing dalam penulisan Tesis Penulis.
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Dr. Bintang R. Simbolon. M.Si.
3. Ketua Program studi MH Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, Dr. Gindo E.L. Lumban Tobing, S.H., M.H.

4. Dr. Bernard Nainggolan S.H., M.H, Penguji dan Pembimbing dalam Penulisan Tesis Penulis.
5. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H, Sebagai Penguji Tamu penulisan Tesis Penulis.
6. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Administrasi MIH Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesai, ibu Murti Haryatmi.
8. Bapak S.M Pangaribuan dan Ibu T.H Sibarani selaku orang tua Penulis
9. Chendrawati Ardy Nanlohy, selaku istri Penulis
10. Anak-anak dan anak mantu, Daniel Tigor Octaviano, S.H., Jessica Marpaung, S.H., L.L.M, Joen Ulli Ursulla, S.H., Clinton Hasudungan Prima, S.H., dan Josh Holong Junior.

Penulis sangat berharap Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkannya dan pada akhirnya Penulis menginginkan koreksi dan kritik serta saran yang membangun agar Penulis dapat menyempurnakan kembali penulisan Tesis ini terutama agar dapat bermanfaat bagi bangsa dan Negara. Amin.

Jakarta, Juli 2020



Johnson Sahat Mauli Tua

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep.....	6
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	6
1.4.2 Kerangka Konsep.....	19
1.5 Metode Penelitian	20
1.6 Sistematika Penulisan	23
1.6.1 Bab. I Pendahuluan	23
1.6.2 Bab. II Tinjauan Pustaka.....	23
1.6.3 Bab. III Pembahasan	24
1.6.4 Bab. IV Pembahasan	24
1.6.5 Bab V Penutup	24
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 25
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan dan Kekayaan Intelektual.....	25
2.1.1 Pengertian dan Pengaturan Kepailitan	25
2.1.2 Harta Pailit dalam Kepailitan.....	30
2.2 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	34
2.2.1 Rezim Kekayaan Intelektual	34
2.2.2 Bentuk, Model, dan jenis Kekayaan Intelektual	37
2.3 Kekayaan Intelektual sebagai Objek Pailit dalam Kepailitan	45
2.4 Tinjauan Umum Lembaga Penaksir.....	46
2.4.1 Tujuan dan Fungsi Lembaga Penaksir	46
2.4.2 Jenis dan Dasar Hukum Lembaga Penaksir	47

2.4.3 Mekanisme Penaksiran Nilai dari Suatu Objek KI yang Menjadi Harta Pailit dalam Perkara Kepailitan dalam Perkara Kepailitan	49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB III PENILAIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN INDONESIA53

3.1 Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit	53
3.2 Penilaian Harta Pailit Berupa Kekayaan Intelektual dalam Perkara Kepailitan.....	57
3.3 Metode Dalam Penilaian Aset Tak Berwujud (intangible asset) Yang Dapat Diterapkan Dalam Perhitungan Nilai Objek KI Yang Menjadi Harta Pailit Dalam Perkara Kepailitan.....	58

BAB IV PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERUPA KEKAYAAN INTELEKTUAL OLEH KURATOR89

4.1 Pengurusan dan Pemberesan terhadap Kekayaan Intelektual oleh Kurator	89
4.2 Konsep Going Concern terhadap Debitor Pailit yang Memiliki Harta Pailit berupa Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan Hukum Kepailitan Indonesia	101

BAB V PENUTUP112

5.1 Kesimpulan	112
5.2 Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA116



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 30/UKI-PPs/MIH/12.2019

Pimpinan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202

JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana semester ganjil 2019/2020.

Sebagai Pembimbing I, nama mahasiswa :

Sarina Sihombing Nim : 1802190009

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.

Jakarta, 4 Desember 2019


Kaprodi Magister Ilmu Hukum



Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR
UJIAN SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM UKI

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	Sarina Sihombing	1802190009	

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Sarina Sihombing

N I M : 1802190009

JUDUL TESIS : Penggunaan Merek Yang Bertentangan Dengan Undang
Undang Merek (Studi Kasus Keputusan MA RI Nomor 582
K/Pdt.Sus HAKI/2013

HARI/TANGGAL: Selasa, 7 Juli 2020

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	85
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilai lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

SARAN PERBAIKAN

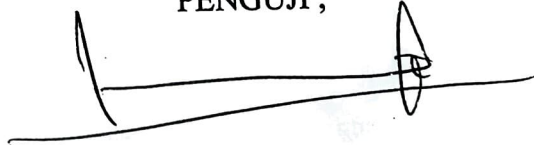
NAMA : Sarina Sihombing

NIM : 1802190009

Saran Perbaikan :

Sebelumnya catikan y sudah dibuat sebelumnya -

PENGUJI,



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

NILAI GABUNGAN 3 PENGUJI

N A M A : Sarina Sihombing

N I M : 1802190009

JUDUL TESIS : Penggunaan Merek Yang Bertentangan Dengan Undang
Undang Merek (Studi Kasus Keputusan MA RI Nomor
582 K/Pdt.Sus-HAKI/2013

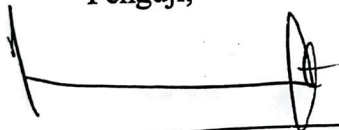
HARI/TANGGAL: Selasa, 7 Juli 2020

Nilai rata-rata =

Nilai huruf =

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C+	2,3
50,0-54,9	C	2,0

Penguji,



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Penguji,

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Penguji,

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.

**PENGUNAAN MEREK
YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 Jo
PUTUSAN MA RI Nomor 562 K/Pdt.Sus-HKI/2013 Jo PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA Nomor No.66/Merck/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst)**



TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana

Oleh:

Nama : Sarina Sihombing

NIM : 1802190009

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Tahun 2020**

**PENGUNAAN MEREK
YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2015 Jo
PUTUSAN MA RI Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo PUTUSAN
PENGADILAN NIAGA Nomor No.66/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst)**



TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Bidang Kajian Utama Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

Nama : Sarina Sihombing

NIM : 1802190009

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

Tahun 2020

PENGUNAAN MEREK
YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2015 Jo PUTUSAN MA
RI Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo PUTUSAN PENGADILAN NIAGA Nomor
No.66/MERREK/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST)

Oleh:

Nama : Sarina Sihombing

NIM : 1802190009

TESIS

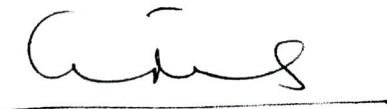
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Bidang Kajian Utama Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah diuji, Jakarta, 7 Juli 2020

Ketua Sidang



Dr. Bernard Nainggolan, SH, MH
Penguji



Dr. Gindo E.L. Tobing, SH, MH.
Penguji



Dr. Binoto Nadapdap, SH, MH
Penguji

PENGUNAAN MEREK
ANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2015 Jo PUTUSAN
MA RI Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
Nomor No.66/MERK/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST)

Oleh:

Nama : Sarina Sihombing

NIM : 1802190009

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Bidang Kajian Utama Hukum Ekonomi dan Bisnis

Jakarta, 19 Juni 2020



Dr. Bernard Nainggolan, SH, MH
Pembimbing 1



Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H.,M.H.
Pembimbing 2

Mengetahui,
Kaprodi Magister Hukum UKI



Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H.,M.H.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister) baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 24 Juni 2020
Yang membuat pernyataan,



Sarina Sihombing
1802190009

ABSTRAK

Nama. : Sarina Sihombing
NIM. : 1802190009
Judul. : Penggunaan Merek Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Merek
(Studi Kasus Putusan MA RI Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2015 Jo Putusan MA RI Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst).

Kata Kunci: penggunaan merek, bertentangan, undang-undang merek

Dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenal sebagai merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek suatu barang atau jasa semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kasus dan permasalahan yang muncul seperti peniruan.

Salah satu kasus peniruan adalah kasus Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug, suatu badan hukum berkedudukan di Singapura yang digugat oleh Russel Vince, seorang Warga Negara Inggris karena dianggap logo Cap Kaki Tiga meniru Lambang Negara Isle of Man.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penggunaan merek yang bertentangan dengan UU Merek di Indonesia dan bagaimanakah persoalan hukum dan akibat hukum yang timbul setelah keluarnya putusan No : 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 23 September 2015 jo Putusan MA No.582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 tanggal 9 Januari 2014 jo Putusan Pengadilan Niaga No. 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persoalan hukum yang terjadi karena penggunaan merek yang bertentangan dengan UU Merek serta mendalami kasus terjadi antara WEN KEN DRUG Co. Pte. Ltd dengan Russel Vince tentang merek Cap Kaki Tiga dan persoalan dengan akibat hukum yang terjadi setelah dikeluarkannya putusan MA RI Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/2015. jo Putusan MA No.582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo Putusan Pengadilan Niaga No. 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian yuridis normatif ini dilakukan penelitian berdasarkan Hukum yang bersifat teoritis melalui penelaahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejarah hukum dan literatur-literatur berkenaan dengan masalah yang dibahas

Hasil penelitian yang didapat adalah Pihak yang merasa dirugikan oleh pendaftaran suatu Merek yang bertentangan dengan Undang-Undang dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan.merek. Russell Vince seorang berkebangsaan Inggris, menggugat Wen Ken Drug terkait penggunaan merek dagang Cap Kaki Tiga, yang menyerupai lambang negara Isle of Man di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Pengadilan menyatakan, merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug batal Demi hukum karena menyerupai atau merupakan tiruan dari lambang mata uang Isle Of Man melalui Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kemudian bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pihak turut tergugat, Russel Vince mengajukan upaya kasasi ke MA. MA menolak kasasi tersebut melalui Putusan MA Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013. Masih tidak terima dengan Putusan tersebut, pihak Wen Ken Drug akhirnya mengajukan PK dan kembali ditolak oleh MA melalui Putusan MA Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2015. Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Dirjen KI Kemenkumham mencoret merek Cap Kaki Tiga dari Daftar Umum Merek, akan tetapi merek Cap Kaki Tiga masih tetap beredar di masyarakat.

Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Merek masih belum bisa mengakomodir persoalan-persoalan gugatan merek.

ABSTRACT

Name. : Sarina Sihombing
NIM. : 1802190009
Title. : *Use of Trademark That Is Contrary to Trademark Law*
(Case Study on MA RI Decision Number 85 PK / Pdt.Sus-HKI / 2015 Jo MA RI Decision Number 582 K / Pdt.Sus-HaKI / 2013 jo Decision of the Commercial Court Number 66 / Trademark / 2012 / PN.Niaga.Jkt.Pst).

Key words : *use of the brand, contrary to, trademark law*

In running a business and marketing goods and services every person or organization of an existing company will be very concerned about the importance of a name and symbol used. These names and symbols are known as brands. The need for legal protection of the brand of goods or services is growing rapidly after many cases and problems that arise such as imitation.

One of the cases of impersonation is the case of Wen Ken Drug's Three Leg Refreshing Solution, a Singapore-based legal entity sued by Russell Vince, a British citizen because it is considered the Cap Kaki Tiga logo imitates the Isle of Man State Symbol.

The formulation of the problem of this research is how is the use of trademarks that are contrary to the Trademark Law in Indonesia and how are legal issues and legal consequences arising after the issuance of the decision No: 85 PK / Pdt.Sus-HKI / 2015 dated 23 September 2015 jo the Decision MA No.582 K / Pdt.Sus-HaKI/2013 dated January 9, 2014 jo Decision of the Commercial Court No. 66 / Trademark / 2012 / PN.Niaga.Jkt.Pst.

The purpose of this research is to find out the legal issues that occur due to the use of trademark that is contrary to the Trademark Law and explore the cases that occur between WEN KEN DRUG Co. Pte. Ltd with Russel Vince about the Cap Kaki Tiga brand and issues with legal consequences that occurred after the issuance of the Supreme Court's decision No. 85 PK / Pdt.Sus-HKI / 2015 jo Decision MA No.582 K / Pdt.Sus-HaKI / 2013 jo Court Decision Commerce No. 66 / Trademark / 2012 / PN.Niaga.Jkt.Pst.

The research method used is normative juridical research. Through this normative juridical research, research based on theoretical law is conducted through a review based on the applicable laws and regulations, the history of law and the literature regarding the issues discussed.

The research results obtained are those who feel aggrieved by the registration of a Mark that is contrary to the Act can take legal action by filing a cancellation claim. Russell Vince, a British national, sued Wen Ken Drug regarding the use of the trademark Cap Kaki Tiga, which resembles the Isle of Man state symbol in the Commercial Court in Central Jakarta District Court. The court stated that Wen Ken Drug's Cap Kaki Tiga brand was null and void by law because it resembled or was an imitation of the Isle of Man currency symbol through the Commercial Court Decision Number 66 / Trademark / 2012 / PN.Niaga.Jkt.Pst. Then together with the Directorate General of Intellectual Property as a defendant, Russel Vince submitted an appeal to the Supreme Court. The Supreme Court rejected the appeal through the Decision of the Supreme Court Number 582 K / Pdt.Sus-HaKI / 2013. Still not accepting the decision, Wen Ken Drug finally filed a PK and was again rejected by the Supreme Court through MA Decree Number 85 PK / Pdt.Sus-HKI / 2015. After the decision has permanent legal force the Director of the Trademark and Geographical Indications Director General of the Ministry of Law and Human Rights Kemenkumham crossed out Cap Kaki Tiga brand from the General Register of Brands, but the Cap Kaki Tiga brand is still circulating in the community.

Here it can be concluded that the Trademark Law is still unable to accommodate the issues of trademark claims.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, yang karena kebaikanNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Penggunaan Merek Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Merek (Studi Kasus Putusan MA RI Nomor 85 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2015 Jo Putusan MA RI Nomor 582 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 jo Putusan Pengadilan Niaga Nomor 66/Merek/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst)”.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih hendak penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, dan juga selaku pembimbing tesis dua..
3. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, SH, MH, selaku pembimbing tesis satu yang mana di tengah-tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan dalam proses penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen, staf pengajar, dan staf administrasi pada Program Studi Hukum Ekonomi dan Bisnis Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing-masing serta membantu penulis dalam hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya.
5. Suami saya, Sydney Hollowell, untuk segala dukungannya baik moril maupun materiil dan juga doanya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya saran atau masukan demi perbaikan tesis ini. Dengan demikian penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis.

Jakarta, 24 Juni 2020



Sarina Sihombing

Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Ujian	ii
Lembar Pengesahan Tesis	iii
Lembar Pernyataan	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	14
1.3.1. Maksud	14
1.3.2. Tujuan	14
1.4. Metode Penelitian	15
1.4.1. Tahapan Penelitian	16
1.4.2. Metode Analisa Data	16
Bab II Tinjauan Pustaka	17
2.1. Kerangka Teoritis	17
2.2. Kerangka Konsep	20
2.2.1. Definisi-definisi	20
2.2.2. Hak Kekayaan Intelektual	21
2.2.2.1. Sejarah Kekayaan Intelektual	23

2.2.2.2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	27
2.2.2.3. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Hak Kekayaan Intelektual	28
2.2.2.4. Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual	30
2.2.3. Merek	31
2.2.3.1. Sejarah Merek	33
2.2.3.2. Merek Terkenal	34
2.2.3.3. Peraturan Tentang Merek	37
2.2.3.3.1. Hukum Nasional Tentang Merek	37
2.2.3.3.2. Konvensi-Konvensi Internasional Tentang Merek	39
2.2.3.4. Perlindungan Pendaftaran Merek	46
2.2.3.5. Pembatalan Merek	49
2.2.3.6. Penghapusan Merek	54
2.2.3.7. Penyelesaian Sengketa Merek	57
Bab III Hasil Penelitian Penggunaan Merek yang Bertentangan dengan Undang-Undang Merek di Indonesia	60
Bab IV Hasil Penelitian Persoalan Hukum dan Akibat Hukum yang Timbul Setelah Keluarnya Keputusan MA Nomor 582 K/PDT.Sus-HaKI/2013	77
4.1. Persoalan hukum yang terjadi dalam keputusan MA Nomor 582 K/PDT.Sus- HaKI/2013	77
4.1.1. Para Pihak Yang Berperkara	77
4.1.2. Kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat	80

4.1.3. Legal Standing Penggugat	81
4.1.4. Alasan-alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Pembatalan	
Pendaftaran Merek	82
4.1.5. Duduk Perkara yang Menjadi Dasar Gugatan Pembatalan	
Merek	84
4.1.6. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri	
Jakarta Pusat.....	91
4.1.7. Alasan-Alasan Kasasi	92
4.1.8. Keputusan Mahkamah Agung	97
4.2. Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Keluarnya Keputusan MA Nomor 582	
K/PDT.Sus-HaKI/2013.....	98
Bab V Penutup	120
5.1. Kesimpulan.....	120
5.2. Saran	121
Daftar Pustaka	122
Lampiran	125



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 33/UKI-PPs/MIH/12.2019

Pimpinan Progran Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202

JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana semester ganjil 2019/2020.

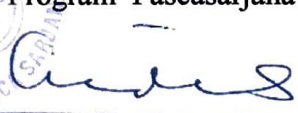
Sebagai Pembimbing I , nama mahasiswa :

Charles Anugrah Marsangap Nim : 1802190039

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.

Jakarta , 4 Desember 2019


Kaprodi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana



Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR
UJIAN SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM UKI

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Juli 2020

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	Charles Anugrah Marsangap	1802190039	

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Charles Anugrah Marsangap

N I M : 1802190039

JUDUL TESIS : Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 huruf (b) Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa (Tinjauan Kasus Putusan No 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 jo Putusan No 513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel)

HARI/TANGGAL: Rabu, 22 Juli 2020

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	80
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilai lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7


Dr. Bernard Nianggolan, S.H.,M.H.

SARAN PERBAIKAN

NAMA : Charles Anugrah Marsangap

NIM : 1802190039

Saran Perbaikan :

- Kosakata B (Bryant - ...)
- Daftar pustaka ?
- Kaitan bab 2 ke bab 3 & 4 (Teori - Kasus)
- Kompetensi absolut & relatif ?

PENGUJI,



Dr. Bernard Nianggolan, S.H., M.H.

NILAI GABUNGAN 3 PENGUJI

NAMA : Charles Anugrah Marsangap
NIM : 1802190039
JUDUL TESIS : Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 huruf (b) Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa (Tinjauan Kasus Putusan No 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 jo Putusan No 513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel)

Nilai rata-rata =

Nilai huruf =

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C+	2,3
50,0-54,9	C	2,0

Penguji,

Penguji,


Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

Penguji,

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
BERDASARKAN PASAL 70 huruf (b) UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(TINJAUAN KASUS
PUTUSAN MA No. 220 B/Pdt.SusArb/2019
jo. PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT No. 207/Pdt.G/2015
DAN
PUTUSAN MA No. 104 B/Pdt.Sus-Arb/2019
jo. PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN No.
513/Pdt.G.ARB/2019)**



TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum Bisnis

Oleh

Charles Anugrah Marsangap
1802190039

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Tahun 2020**

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
BERDASARKAN PASAL 70 huruf (b) UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(TINJAUAN KASUS
PUTUSAN MA No. 220 B/Pdt.SusArbt/2016
jo. PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT No. 207/Pdt.G/2015
DAN
PUTUSAN MA No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019
jo. PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN No.
513/Pdt.G.ARB/2018)**



TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum Bisnis**

**Oleh
Charles Anugrah Marsangap
1802190039**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
Tahun 2020**

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
BERDASARKAN PASAL 70 huruf (b) UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(TINJAUAN KASUS
PUTUSAN MA No. 220 B/Pdt.SusArbt/2016
jo. PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT No. 207/Pdt.G/2015
DAN
PUTUSAN MA No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019
jo. PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN No.
513/Pdt.G.ARB/2018)**


Oleh
Charles Anugrah Marsangap
1802190039

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum Bisnis

Jakarta, 22 Juli 2020

	
<u>Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.</u> Pembimbing 1	<u>Dr. Gindo E. L. Tobing, SH., MH.</u> Pembimbing 2

Mengetahui,

Kaprodi Magister Hukum UKI
Dr. Gindo E. L. Tobing, SH., MH.

**PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
BERDASARKAN PASAL 70 huruf (b) UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(TINJAUAN KASUS
PUTUSAN MA No. 220 B/Pdt.SusArbt/2016
jo. PUTUSAN PN JAKARTA PUSAT No. 207/Pdt.G/2015
DAN
PUTUSAN MA No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019
jo. PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN No.
513/Pdt.G.ARB/2018)**

Oleh
Charles Anugrah Marsangap
1802190039

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Hukum Bisnis

Telah diuji, di Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Sidang,



Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH.

Penguji



Dr. Gindo E. L. Tobing, SH., MH.

Penguji



Dr. Binoto Nadapdap, SH., MH.

Penguji

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister) baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 22 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



Rp 3.000
TIGA RIBU RUPIAH

Charles Anugrah Marsangap
1802190039

ABSTRAK

- A. Nama : Charles Anugrah Marsangap
B. NIM : 1802190039
C. Judul : Pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan pasal 70 huruf (b) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tinjauan Kasus Putusan MA No. 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 *jo.* Putusan PN Jakarta Pusat No. 207/Pdt.G.ARB/2015 dan Putusan MA No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 *Jo.* Putusan PN Jakarta Selatan No. 513/Pdt.G.ARB/2018)
D. Kata kunci : arbitrase, sengketa, alasan pembatalan, pembatalan putusan

Pesatnya perdagangan di era globalisasi saat ini telah memberikan dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan perselisihan, pertentangan ataupun perbedaan pendapat. Sengketa di dalam hubungan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Setiap sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah Arbitrase. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, lebih memberikan kebebasan, pilihan otonomi, dan kerahasiaan kepada para pihak yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan dalam prosesnya. Meskipun sifat putusan arbitrase adalah final dan mengikat, akan tetapi dalam UU No. 30 Tahun 1999 dalam pasal 70 diatur mengenai pembatalan putusan arbitrase itu sendiri. Namun demikian, dalam praktek pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, masih mengalami ketidakseragaman penafsiran dalam alasan pembatalan putusan arbitrase yang dalam penelitian ini menitikberatkan pada pasal 70 huruf (b) UU No. 30 Tahun 1999. Ketidakseragaman putusan-putusan pengadilan mengenai pembatalan putusan arbitrase tersebut tentu dapat menimbulkan celah hukum yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk. Jika hal ini terjadi maka prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang efektif dan efisien tidak akan tercapai.

ABSTRACT

- A. Name : Charles Anugrah Marsangap
B. NIM : 1802190039
C. Title : *Annulment of Arbitration Verdict based on article 70 letter (b) of Law No. 30 year 1999 concerning of Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Case Review of Supreme Court Verdict No. 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 jo. Central Jakarta District Court No. 207/Pdt.G.ARB/2015 and Supreme Court Verdict No. 104 B/Pdt.Sus-Arb/2019 jo. South Jakarta District Court Verdict No. 51 /Pdt.G.ARB/2018*
D. Key Words : *arbitration, dispute, cause of cancellation, cancellation of verdict*

The rapid trade in the era of globalization has had a positive impact on social life, but on the other hand also caused disputes, disagreements or differences of opinion. Dispute in a business relationship is basically something that is not expected to occur because it can cause harm to the parties involved in it. Every dispute that occurs always requires a quick solution and resolution. The more and more extensive trading activities, the higher the frequency of disputes. This means that more disputes must be resolved. One of many alternatives to settling disputes outside the court is Arbitration. In the process of resolving disputes through arbitration, giving more parties the freedom, choice of autonomy and confidentiality to the parties they wish, distinct to the court system that has established judges who will play a role in the process. Although the character of the arbitration verdict are final and binding, in Law No. 30 of 1999 in article 70 regulates the cancellation of the verdict itself. However, in the practice of annulment of arbitration verdict by the District Court up to the Supreme Court, there is still a variety of interpretations in the reason for annulment of the arbitration verdict, which in this study focuses on article 70 letter (b) of Law No. 30 of 1999. The lack of uniformity of court decisions regarding the annulment of the arbitration verdict can certainly make a space that can be used by parties who have a bad faith. The effectiveness and efficiency of dispute resolution will not be achieve if this matter happens.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan anugerah-Nya, penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis sebelumnya tidak pernah membayangkan akan dapat menempuh pendidikan hingga sampai dengan tingkat magister hukum, hal ini semakin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik dan kuasanya melebihi akal pikiran manusia.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Rasa hormat dan ucapan terima kasih hendak penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, SH., MH., selaku pembimbing tesis satu dan Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing, SH., MH., selaku pembimbing tesis dua serta Bapak Dr. Binoto Nadapdap, SH., MH., yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran, masukan, serta perbaikan dalam proses penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen, staf pengajar, dan staf administrasi pada Program Studi Hukum Ekonomi dan Bisnis Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mata perkuliahan masing-masing serta membantu penulis dalam hal administratif dan kelengkapan teknis lainnya.
5. Kepada Istri dan anak-anak saya, Metha, Sky dan Sean yang selalu memberikan kebahagiaan serta motivasi untuk membuat penulis senantiasa bersemangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Kepada orang tua serta seluruh keluarga saya atas segala kasih sayang, motivasi, serta dukungan baik dukungan moril dan materiil, dan doanya kepada penulis untuk mencapai hasil terbaik.
7. Kepada abang Ricky Hasibuan, selaku mentor yang telah mendaftarkan saya untuk mengambil program magister di UKI.
8. Kepada teman-teman kantor, Wiliam, Hans, Kiki, Anna, Agung yang bersedia mendukung saya dalam menjalani program magister ini.
9. Kepada teman-teman sekelas Pasca sarjana MH UKI 2018 yang telah memberikan warna dalam menjalani masa-masa perkuliahan, mengingatkan kembali masa-masa saat menjalani perkuliahan terdahulu, serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan adanya saran atau

masuk demi perbaikan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 Juli 2020



Charles Anugrah Marsangap
1802190039

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Perumusan Masalah	22
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	23
1.3.1. Maksud Penelitian	23
1.3.2. Tujuan Penelitian	23
1.4. Metode Penelitian	24
1.5. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1. Kerangka Teoritis	27
2.1.1. Teori Efektivitas Hukum	29
2.1.2. Teori Penyelesaian Sengketa	43
2.2. Kerangka Konsepsional	50
BAB III PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE	53
3.1. Klausula Arbitrase	53
3.2. Putusan Arbitrase	54
3.2.1. Jenis Putusan Arbitrase	54
3.2.2. Syarat-syarat Putusan Arbitrase	55
3.2.3. Kekuatan Putusan Arbitrase	60
3.2.4. Sifat Putusan Arbitrase	62
3.3. Alasan-alasan Pembatalan Putusan Arbitrase ...	64
3.4. Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase	69
BAB IV ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE	81
4.1. Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Praktek ..	81
4.1.1. Putusan MA No. 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 jo. Putusan PN Jakarta Pusat No. 207/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst	81

4.1.2. Putusan MA	
No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019	
jo. Putusan PN Jakarta Selatan	
No. 513/Pdt.G.ARB/2018/PN Jkt.Sel ..	85
4.2. Analisa Hukum	88
BAB V PENUTUP	96
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	101



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 187/UKI-PPs/MIH/10.2018

Pimpinan Progran Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202


JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana semester ganjil 2018/2019.

Sebagai Pembimbing I , nama mahasiswa :

Lousia Ester Beby Nim : 1702190001

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.

Jakarta , 26 Oktober 2018
Kaprodi Magister Ilmu Hukum

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 66/UKI-PPs/MIH/10.2017

Pimpinan Progran Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202

JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana semester ganjil 2017/2018.

Sebagai Pembimbing I , nama mahasiswa :

Helmy Avulina NIM : 1602190018

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.



Jakarta , 14 Oktober 2017

Kaprodi Magister Ilmu Hukum


Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 188/UKI-PPs/MIH/10.2018

Pimpinan Progran Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202

JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana semester ganjil 2017/2018.

Sebagai Pembimbing I, nama mahasiswa :

Ronald Bonari Siahaan NIM : 1702190016

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.

Jakarta, 26 Oktober 2018

Kaprodi Magister Ilmu Hukum

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

PT. DJAKARTA LLYOD (PERSERO)

Tinjauan Kasus :
Putusan PT. Djakarta Llyod (Persero)
Nomor 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

Oleh

HELMY AVULINA
1602190018

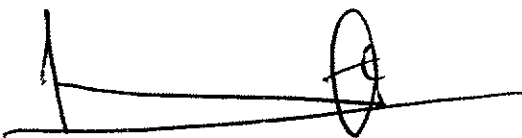
TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kaitan Utama Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di hadapan Penguji Tesis
Pada hari Sabtu, tanggal 27 Oktober 2018

Tim Penguji,

Ketua



Dr. Bernard Nainggolan, S.H, M.H



Dr. Manotar Tampubolon, S.H, M.H

Anggota



Dr. Andari Yurikosari, S.H, M.H

Anggota

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

PT. DJAKARTA LLYOD (PERSERO)

Tinjauan Kasus :
Putusan PT. Djakarta Llyod (Persero)
Nomor 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

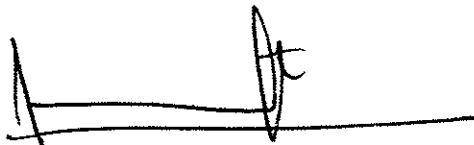
Oleh

HELMY AVULINA
1602190018

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kaitan Utama Hukum Bisnis**

Jakarta, 27 Oktober 2018



Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H

Pembimbing 1



Dr. Manotar Tampubolon, S.H. M.H

Pembimbing 2

Mengetahui
Program Magister Ilmu Hukum UKI
KETUA,



Dr. Gindo E. L. Tobing S.H. M.H

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

PT. DJAKARTA LLYOD (PERSERO)

Tinjauan Kasus :
Putusan PT. Djakarta Llyod (Persero)
Nomor 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

Oleh

HELMY AVULINA
1602190018

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kaitan Utama Hukum Bisnis

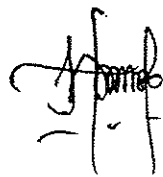


PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Tahun 2018

DAFTAR HADIR
UJIAN SIDANG TESIS
PMIH UKI

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Oktober 2018

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1.	Helmy Avulina	1602190018	

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Helmy Avulina

N I M : 1602190018

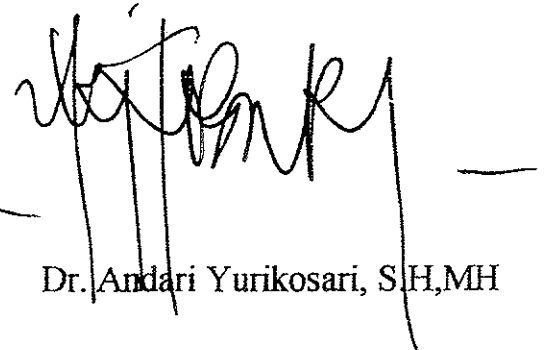
JUDUL TESIS :

Kepailitan Badan Usaha Milik Negara PT. Djakarta LLyod (Persero) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

HARI/TANGGAL: Sabtu, 27 Oktober 2018

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	80
2	Mutu Keilmuan	80
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	80
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	80
5	Sistematika	80
6	Unsur-unsur penilai lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : <u>penemuan (kebaharuan)</u> Unsur : <u>konsistensi penulisan</u>	80 80

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7



Dr. Andari Yurikosari, S.H, MH

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Helmy Avulina

N I M : 1602190018

JUDUL TESIS :

Kepailitan Badan Usaha Milik Negara PT. Djakarta LLyod (Persero) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

HARI/TANGGAL: Sabtu, 27 Oktober 2018

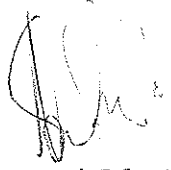
NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	85
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilain lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7


Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,MH

DAFTAR HADIR
UJIAN SIDANG TESIS
PMIH UKI

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Februari 2020

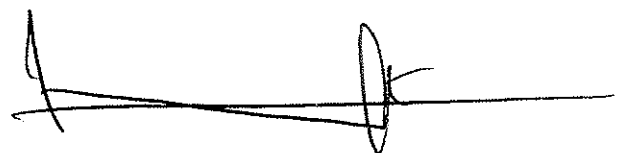
NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	Lousia Ester Beby	1702190001	 LE Beby.

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

Nama : Lousia Ester Beby
 NIM : 1702190001
 Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Kasus Kepailitan Perusahaan (KKKS) Migas. Studi Kasus Gugatan Pailit PT. Global Pacific Energi Terhadap PT. Golden Spike Energy Indonesia.
 Hari/Tanggal : Jumat, 7 Februari 2020

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	78
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilain lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :	

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

SARAN PERBAIKAN

Nama : Lousia Ester Beby

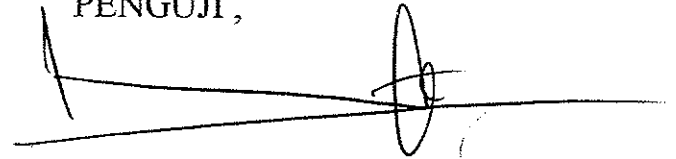
NIM : 1702190001

Saran Perbaikan :

Diperbaiki sesuai dgn catatan dr

Tesis

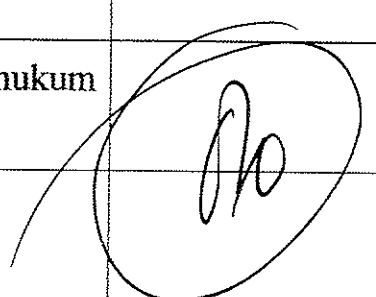
PENGUJI,



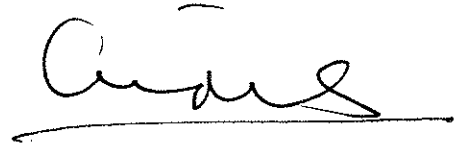
Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

Nama : Lousia Ester Beby
NIM : 1702190001
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Kasus Kepailitan Perusahaan (KKKS) Migas. Studi Kasus Gugatan Pailit PT. Global Pacific Energi Terhadap PT. Golden Spike Energy Indonesia.
Hari/ Tanggal : Jumat, 7 Februari 2020

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilai lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :	

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0


Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

SARAN PERBAIKAN

N A M A : Lousia Ester Beby

N I M : 1702190001

Saran Perbaikan :

He ada jamians & delitas kemahitan
mendapatk perjamah(?) - pd hal
ada perjamah perjamah (kemahitan)

PENGUJI,



Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

Nama : Lousia Ester Beby

NIM : 1702190001

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Kasus Kepailitan Perusahaan (KKKS) Migas. Studi Kasus Gugatan Pailit PT. Global Pacific Energi Terhadap PT. Golden Spike Energy Indonesia.

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Februari 2020

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilain lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : <i>Penguasaan Masalah</i> Unsur : <i>Metode Penelitian</i>	<div>.....</div> <div>.....</div>

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7


Dr. Wiwik Sri Widarty, S.H., M.H.

SARAN PERBAIKAN

Nama : Lousia Ester Beby

NIM : 1702190001

Saran Perbaikan :

1. *Alasan Spasial lagi Sibut, halana.*
Spasial. Metode prestasi, pada masalah/kegiatan.
2. *Penggunaan pada prestasi.*
Spasial lagi, kempila & swa.

PENGUJI,



Dr. Wiwik Sri Widhiarty, S.H., M.H.

NILAI GABUNGAN 3 PENGUJI

N A M A : Lousia Ester Beby

N I M : 1702190001

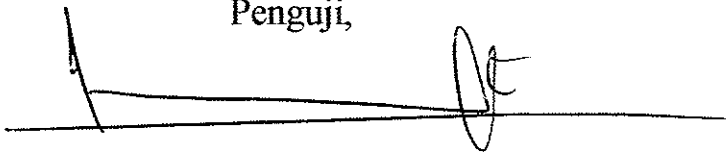
JUDUL TESIS : Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Kasus Kepailitan Perusahaan (KKKS) Migas. Studi Kasus Gugatan Pailit PT. PT. Golden Spike Energy Indonesia.

Nilai rata-rata =

Nilai huruf =

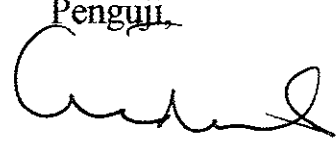
NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C+	2,3
50,0-54,9	C	2,0

Penguji,



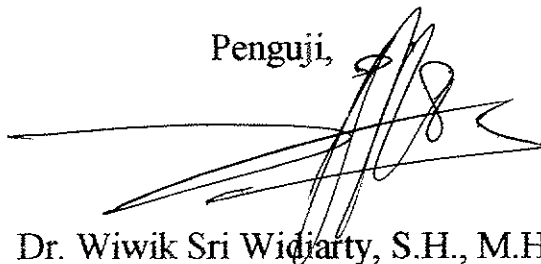
Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Penguji,



Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.


Penguji,



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

DAFTAR HADIR
UJIAN PROPOSAL TESIS
PMIH UKI

HARI/TANGGAL : Sabtu, 27 Oktober 2018
RUANG : Sidang PMIH UKI
WAKTU :

NO	NIM	NAMA	TANDA TANGAN
1	1702190016	Ronald Bonari Siahaan	

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG PROPOSAL TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UKI

HARI /TGL : Sabtu, 27 Oktober 2018

N A M A : Ronald Bonari Siahaan

N I M : 1702190016

Judul : Tinjauan Yuridis Eksploitasi HKI Lewat Perjanjian Lisensi Paten
Yang Tidak Pro Competitive Terhadap Persaingan Usaha : Suatu Perbandingan Studi
Kasus Metode Pembatasan KPPU dan FTC di Amerika

NILAI : 90

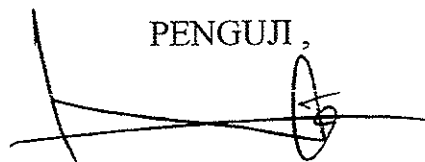
NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C+	2,3
50,0-54,9	C	2,0

SARAN PERBAIKAN :

- Variable 2 saja -

- Monopoli ke eksploitasi HKI di KPPU

PENGUJI,



Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,MH

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG PROPOSAL TESIS
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UKI

HARI /TGL : Sabtu, 27 Oktober 2018

N A M A : Ronald Bonari Siahaan

N I M : 1702190016

Judul : Tinjauan Yuridis Eksploitasi HKI Lewat Perjanjian Lisensi Paten
Yang Tidak Pro Competitive Terhadap Persaingan Usaha : Suatu Perbandingan Studi
Kasus Metode Pembatasan KPPU dan FTC di Amerika

NILAI

85

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C+	2,3
50,0-54,9	C	2,0

SARAN PERBAIKAN :

terbukti/terbukti teori yg akan di gunakan
yg membedakan analisis kasus masalah
yg di gunakan.

PENGUJI,



Dr. Gindo E.L. Tobing, SH,MH



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 12/UKI-PPs/MIH/10.2018

Pimpinan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202

JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana semester ganjil 2017/2018.

Sebagai Pembimbing II, nama mahasiswa :

Haratua NIM : 1602190042

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.

Jakarta, 5 Mei 2018

Kaprodi Magister Ilmu Hukum


Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

SIDANG PEMBUKAAN UJIAN TESIS

Pada hari ini Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 atas berkat Tuhan yang Maha Esa dan demi menjunjung tinggi prinsip obyektivitas ilmu pengetahuan hukum, dengan ini Sidang Tesis terhadap :

N A M A : Haratua DP Purba

N I M : 1602190042

JUDUL TESIS :


Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Memeriksa Penetapan Lokasi Pembangunan

(Studi Putusan Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT)

Saya buka dan dinyatakan terbuka untuk kalangan civitas akademika.

**DAFTAR HADIR
UJIAN SIDANG TESIS
PMIH UKI**

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Oktober 2018

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1.	Haratua DP Purba	1602190042	

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Haratua DP Purba

N I M : 1602190042


JUDUL TESIS :

Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Memeriksa Penetapan Lokasi Pembangunan
(Studi Putusan Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT)

HARI/TANGGAL: Sabtu, 27 Oktober 2018

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	85
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilain lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0


Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,MH

SARAN PERBAIKAN

N A M A : Haratua DP Purba

N I M : 1602190042

Saran Perbaikan :

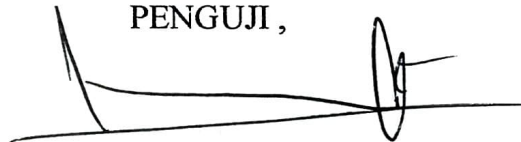
Tambah Teori ability dan Jeremy
with analisis penguasaan kemampuan —

.....

.....

.....

PENGUJI,



Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,MH

**PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MEMERIKSA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN**

(Studi kasus Putusan Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT)

OLEH :

**Haratus D. P. Purba
NIM : 1602190042**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 2018**

**PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MEMERIKSA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT)**

OLEH :

**Haratua D. P. Purba
NIM : 1602190042**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 2018**

**PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MEMERIKSA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT)**

OLEH :

**Haratua D. P. Purba
NIM : 1602190042**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 2018**

**PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MEMERIKSA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT)**

Oleh :

**Haratua D. P. Purba
NIM : 1602190042**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara**

Jakarta, 27 Oktober 2018



**Prof. Dr. Muchtar B. Pakpahan, S.H., M.A.
Pembimbing I**



**Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H
Pembimbing II**

**Mengetahui,
Program Magister Ilmu Hukum UKI**



Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H.

**PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MEMERIKSA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT)**

Oleh :

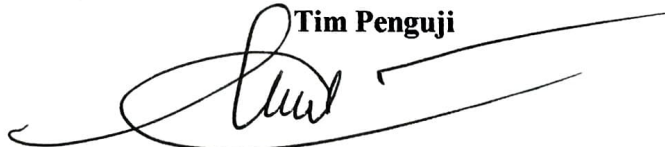
**Haratua D. P. Purba
NIM : 1602190042**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Tesis
Pada Hari Sabtu, 27 Oktober 2018**

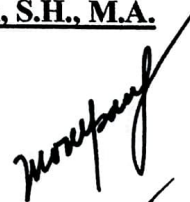
Tim Penguji



Prof. Dr. Muchtar B. Pakpahan, S.H., M.A.
Ketua



Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.
Anggota



Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.H.
Anggota

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa arahan dari pihak lain kecuali secara tertulis telah dengan nyata dan jelas dicantumkan sebagai referensi dalam naskah dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 27 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Haratua D. P. Purba

1602190042

ABSTRAK

Nama : Haratua D. P. Purba

Judul : PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA MEMERIKSA PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum membawa perubahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara karena kewenangan mengadili semakin luas. Keputusan gubernur berupa penetapan lokasi yang tidak memenuhi syarat individual dan diterbitkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu jangka waktu pengajuan gugatan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur pengajuan gugatan hari diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan gugatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan. Terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan perkara karena merupakan perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, namun terkait dengan prosedur atau formalnya Majelis Hakim tidak menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan alasan belum ada aturan perundang-undangan yang jelas mengatur pedoman beracara persidangannya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dengan prinsip hakim aktif menemukan hukum (*rechvinding*) manakala hukumnya ada akan tetapi tidak jelas atau mengatur secara umum.

ABSTRACT

Name : Haratua D. P. Purba

Title : THE EXTENSION OF AUTHORITIES STATE ADMINISTRATIVE
COURT TO EXAMINE CONFIRMATION OF THE LOCATION
DEVELOPMENT (Case Study Decision Number
114/G/2014/PTUN.JKT)

The enactment of the Law Number 2 of 2012 concerning Acquisition of Land for Development in the Public Interest has brought changes to the State Administrative Court because the authority to prosecute is increasingly widespread. The governor's decree in the form of confirmation location that do not meet individual requirements and issued in emergency circumstances for the public interest can be used as objects of dispute in the State Administrative Court. In addition the time period for filing a lawsuit is 30 (thirty) working days of the issue of the location confirmation different with Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts that regulate the filing of a day's lawsuit submitted within a period of 90 (ninety days) from the time receipt or announcement of the Decree of the State Administration Agency or Officer. Furthermore, Law Number 2 of 2012 stipulates the State Administrative Court shall hold the lawsuit within 30 (thirty) working days of the receipt of the lawsuit. Related to the Jakarta State Administrative Court Decision Number 114/G/2014/PTUN-JKT, the Panel of Judges examining the case stated that has competentie to adjudicate and settle the case because it was an extension of the competentie of the State Administrative Court as stipulated in Law Number 2 of 2012, but related to the procedure or formal the Panel of Judges does not use the provisions of Law Number 2 of 2012 on the grounds that there are no laws and regulations that clearly regulate the guidelines for the trial. This raises legal uncertainty because the Panel of Judges of the State Administrative Court with the principle of active judges should have to find the law (*rechvinding*) when the law is there but is unclear or regulates in general.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya Penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini. Pada kesempatan ini izinkan Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu Penulis untuk menyelesaikan tesis ini, antara lain :

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor UKI.
2. Dr. Gindo E. L. Tobing, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UKI.
3. Prof. Dr. Muchtar B. Pakpahan, S.H., M.A. dan Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. selaku Pembimbing di tengah kesibukannya telah memberikan waktu untuk memberikan saran dan perbaikan terhadap penulisan tesis ini.
4. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Pegawai pada Program Magister Ilmu Hukum UKI yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan memberikan bantuan pada Penulis selama menyelesaikan kuliah.
5. Ibu Yayan Yuhanah, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta yang memberikan izin dan dukungan bagi Penulis untuk kuliah.
6. Rekan-rekan Penulis di Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta khususnya Sub Bagian Bantuan Hukum I (Adityo Nugroho, S.H., M.H, Nadia Zunairoh, S.H., dan Sudono).
7. Orang tua Penulis, Ayah St. D. Purba di Surga dan Ibu D. br. Simamora yang menjadi teladan dan penyemangat bagi Penulis dalam hidup.
8. Keluarga Penulis, khususnya Risma M. Manurung dan Doniarta Haris Adelio Purba, istri dan anak Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan cintanya bagi Penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis berharap adanya saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat untuk pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Jakarta, 27 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI TESIS

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.3.1 Maksud	11
1.3.2 Tujuan	11
1.4 Kerangka Teoritis dan Konsep	12
1.4.1 Kerangka Teoritis	12
1.4.2 Kerangka Konsep	31
1.5 Metode Penelitian	32
1.6 Sistematika Penulisan	34

BAB II PERADILAN TATA USAHA NEGARA

2.1 Sejarah Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara	37
2.2 Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ...	45
2.3 Kompetensi (Kewenangan) Pengadilan Tata Usaha Negara ..	47

2.4 Subjek Sengketa Tata Usaha Negara	49
2.5 Objek Sengketa Tata Usaha Negara	51
2.6 Alur Pemeriksaan Gugatan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara ..	56

BAB III PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

3.1 Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan	67
Untuk Kepentingan Umum	
3.2 Pengertian Pengadaan Tanah	70
3.3 Pengertian Kepentingan Umum	71
3.4 Jenis-Jenis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk	72
Kepentingan Umum	
3.5 Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah	74
3.6 Prinsip dan Asas Pengadaan Tanah	76
3.7 Tahapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk	79
Kepentingan Umum	
3.8 Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara	87
Memeriksa Penetapan Lokasi	

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 114/G/2014/PTUN-JKT

4.1 Kronologis	89
4.2 Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara	92
4.3 Jangka Waktu Mengajukan Gugatan	95
4.4 Proses Pemeriksaan Gugatan	97

4.5 Upaya Hukum	101
-----------------------	-----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	105
----------------------	-----

5.2 Saran	105
-----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	viii
----------------------	------

LAMPIRAN



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 64/UKI-PPs/MIH/10.2017

Pimpinan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202


JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana semester ganjil 2017/2018.

Sebagai Pembimbing II, nama mahasiswa :

Julius Fernando Hutabarat NIM : 1602190005

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.

Jakarta, 14 Oktober 2017
Kaprodi Magister Ilmu Hukum

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

SIDANG PEMBUKAAN UJIAN TESIS

Pada hari ini Senin, tanggal 16 Juli 2018, Atas berkat Tuhan yang Maha Esa dan demi menjunjung tinggi prinsip obyektivitas ilmu pengetahuan hukum, dengan ini Sidang Tesis terhadap :

N A M A : Julius Fernando Hutabarat


N I M : 1602190005

Judul Tesis : Pemberesan Boedel Pailit Terhadap Asset Perusahaan Yang Berlebih Dari Jumlah Tagihan

Saya buka dan dinyatakan terbuka untuk kalangan civitas akademika.

**DAFTAR HADIR
UJIAN SIDANG TESIS
PMIH UKI**

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juli 2018

NO.	NIM	NAMA	TANDA TANGAN
1	1602190005	Julius Fernando Hutabarat	

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Julius Fernando Hutabarat

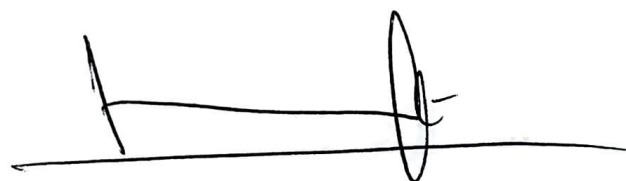
N I M : 1602190005

Judul Tesis : Perlindungan Merk Terdaftar pasca Protokol Madrid

HARI/TANGGAL: Senin, 16 Juli 2018

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	85
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilai lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :	

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7



Dr. Bernard Nainggolan,SH,MH

SARAN PERBAIKAN

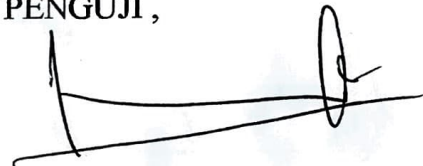
N A M A : Julius Fernando Hutabarat

N I M : 1602190005

Saran Perbaikan :

- Pengaruh positif Protokol Madrid terhadap usaha ind. / objek studi -

PENGUJI,



Dr. Bernard Nainggolan,SH,MH



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 64/UKI-PPs/MIH/10.2017

Pimpinan Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202


JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana semester ganjil 2017/2018.

Sebagai Pembimbing II, nama mahasiswa :

Julius Fernando Hutabarat NIM : 1602190005

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.

Jakarta, 14 Oktober 2017
Kaprodi Magister Ilmu Hukum

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

SIDANG PEMBUKAAN UJIAN TESIS

Pada hari ini Senin, tanggal 16 Juli 2018, Atas berkat Tuhan yang Maha Esa dan demi menjunjung tinggi prinsip obyektivitas ilmu pengetahuan hukum, dengan ini Sidang Tesis terhadap :

N A M A : Julius Fernando Hutabarat


N I M : 1602190005

Judul Tesis : Pemberesan Boedel Pailit Terhadap Asset Perusahaan Yang Berlebih Dari Jumlah Tagihan

Saya buka dan dinyatakan terbuka untuk kalangan civitas akademika.

**DAFTAR HADIR
UJIAN SIDANG TESIS
PMIH UKI**

Hari/Tanggal : Senin, 16 Juli 2018

NO.	NIM	NAMA	TANDA TANGAN
1	1602190005	Julius Fernando Hutabarat	

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Julius Fernando Hutabarat

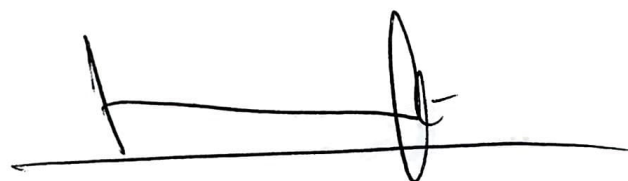
N I M : 1602190005

Judul Tesis : Perlindungan Merk Terdaftar pasca Protokol Madrid

HARI/TANGGAL: Senin, 16 Juli 2018

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	85
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilai lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :	

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7



Dr. Bernard Nainggolan,SH,MH

SARAN PERBAIKAN

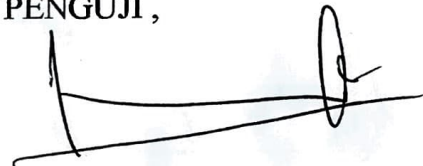
N A M A : Julius Fernando Hutabarat

N I M : 1602190005

Saran Perbaikan :

- Pengaruh positif Protokol Madrid kepada usaha terd. / obyek studi -

PENGUJI,



Dr. Bernard Nainggolan,SH,MH



Universitas Kristen Indonesia

Program Pascasarjana

SURAT TUGAS

NO. 11/UKI-PPs/MIH/10.2016

Pimpinan Progran Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia menugaskan kepada dosen :

N a m a : Dr. Bernard Nainggolan, S.H. M.H.

NIDN : 0304206202

JJA : Lektor

Untuk melaksanakan bimbingan Penulisan Tesis kepada mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana semester ganjil 2017/2018.

Sebagai Pembimbing II , nama mahasiswa :

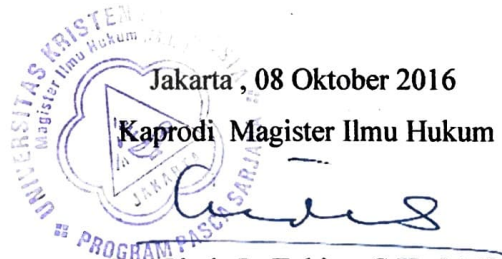
Sanggam Indra P NIM : 1502190005

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UKI.

Jakarta , 08 Oktober 2016

Kaprodi Magister Ilmu Hukum

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.



SIDANG PEMBUKAAN UJIAN TESIS

Pada hari ini Senin, tanggal 16 Juli 2018, Atas berkat Tuhan yang Maha Esa dan demi menjunjung tinggi prinsip obyektivitas ilmu pengetahuan hukum, dengan ini Sidang Tesis terhadap :

N A M A : Sanggam Indra Permana

N I M : 1502190015

Judul Tesis : Pemberesan Boedel Pailit Terhadap Asset Perusahaan
Yang Berlebih Dari Jumlah Tagihan

Saya buka dan dinyatakan terbuka untuk kalangan civitas akademika.

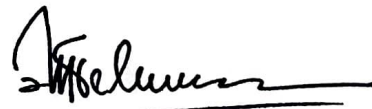
LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Sanggam Indra Permana
N I M : 1502190015
Judul Tesis : Pemberesan Boedel Pailit Terhadap Asset Perusahaan Yang Berlebih Dari Jumlah Tagihan

HARI/TANGGAL: Senin, 16 Juli 2018

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	A-(76)
2	Mutu Keilmuan	A-(76)
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	A-(96)
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	A=(76)
5	Sistematika	B ₂ +(70)
6	Unsur-unsur penilai lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7



Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,MH

LEMBAR PENILAIAN UJIAN SIDANG TESIS

N A M A : Sanggam Indra Permana

N I M : 1502190015

Judul Tesis : Pembersihan Boedel Pailit Terhadap Asset Perusahaan Yang Berlebih Dari Jumlah Tagihan

HARI/TANGGAL: Senin, 16 Juli 2018

NO.	UNSUR PENILAIAN	NILAI
1	Nilai Keilmuan	76
2	Mutu Keilmuan	
3	Nilai Praktis Masalah yang Dibahas	
4	Penguasaan mengenai landasan teori dan hukum yang berhubungan	
5	Sistematika	
6	Unsur-unsur penilain lain berdasarkan pertimbangan penguji. Unsur : Unsur :	

NILAI AKHIR	NILAI HURUF	NILAI MUTU
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,9	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7



Dr. Bernard Nainggolan, S.H.,MH



Oleh

SANGGAM INDRA PERMANA, SH

NPM. 150.219.0015

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Magister Hukum

Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Tahun 2018

**PEMBERESAN BOEDEL PAILIT TERHADAP ASSET PERUSAHAAN
YANG BERLEBIH DARI JUMLAH TAGIHAN**



TESIS
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Hukum Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

Nama : SANGGAM INDRA PERMANA, SH

NIM :150.219.0015

Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama Hukum Ekonomi & Bisnis
Jakarta
2018

**PEMBERESAN BOEDEL PAILIT TERHADAP ASSET PERUSAHAAN
YANG BERLEBIH DARI JUMLAH TAGIHAN**

Oleh

SANGGAM INDRA PERMANA, SH

NPM. 150.219.0015

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Magister Hukum

Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis

Jakarta, Juli 2018

**Mengetahui,
Program Magister Ilmu Hukum UKI
KETUA,**


(Dr. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum.)

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sanggam Indra Permana Sianipar, SH
NPM : 150.219.0015
Fakultas : Hukum
Bidang Kaitan Utama : Hukum Bisnis
Jenjang Studi : Strata 2 (dua)
Judul : Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan
(Studi Kasus Terhadap

Jakarta, Mei 2018

Tim Penguji

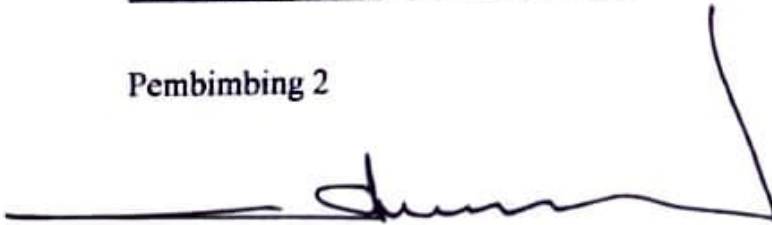
Pembimbing 1



Dr. Bernard Nainggolan S.H, M.H

Tanda Tangan :

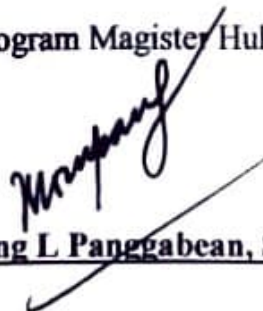
Pembimbing 2



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H, M.H, MBA

Anggota

Ketua Program Magister Hukum UKI



Dr. Mompang L Panggabean, SH, M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jakarta, Juli 2018



Sanggam Indra Permana Sianipar, SH
NIM.150.219.0015

ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberesan boedel pailit perusahaan dan hak rehabilitasi debitur pailit untuk melakukan Rehabilitasi setelah melakukan pemberesan boedel pailit beserta hambatannya.

Kurator merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam suatu proses perkara kepailitan, karena kurator bertugas melaksanakan pemberesan harta pailit. Sebagai kurator baik pemerintah maupun swasta dituntut tidak boleh ada benturan kepentingan didalam melakukan tugas-tugasnya serta harus memiliki transparansi bai terhadap Debitur maupun kreditor.

Tesis ini adalah berifat deskriptif. Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil lalu mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa keberadaan Undang-Undang Kepailitan memberikan harapan besar kepada kreditur dan debitur dan para pelaku usaha untuk menyelamatkan harta/aset. Akibat dari kepailitan Perseroan Terbatas mengakibatkan organ Perseroan Terbatas demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas dalam kepengurusannya, kuratorlah yang mengambil alih memegang hak dan kepengurusan Perseroan Terbatas, Peran penting curator sebagai pihak yang berhak melakukan pencocokan terhadap jumlah hutang debitur dan asset yang dimiliki oleh debitur harus bersifat transparansi. Selain itu jika sudah terbukti Debitur pailit melakukan pemberesan kewajiban-kewajibannya kepada para kreditor maka, Debitur berhak melakukan rehabilitasi dan berhak untuk melakukan kegiatan usaha nya kembali.

Kata Kunci : Pemberesan Boedel pait terhadap asset perusahaan yang berlebih dari jumlah tagihan.

Dosen Pembimbing I : Dr. Bernard Nainggolan S.H, M.H

Dosen Pembimbing II : Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH,MH,MBA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat & karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan Judul **“PEMBERESAN BOEDEL PAILIT TERHADAP ASSET PERUSAHAAN YANG BERLEBIH DARI JUMLAH TAGIHAN”**.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penulisan ini, penulis menyadari ada banyak kekurangan, maka penulis dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun dan akan membantu penulis dalam menyempurnakan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas berkat perhatian, dorongan dan arahan dari Dosen Pembimbing dan para Dosen pengajar, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan semuanya satu persatu yang telah membantu sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Demikian juga penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan akademis Universitas Kristen Indonesia, yaitu:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH, MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Ir. Tarsicius Sunaryo, MA, Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Universitas Kristen Indonesia.

3. Dr.Mompang L.Panggabean,S.H., M.Hum., selaku .Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
4. Dr. Bernard Nainggolan S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH,MH,MBA sebagai Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing Penulis dalam menyusun Tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
7. Istri saya tersayang Rosita Evalina, SH, MH yang selalu mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan kuliah Magister Ilmu Hukum.

Penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan adanya koreksi dan saran-saran yang konstruktif dari semua pihak.

Jakarta, Juli 2018

Penulis,



Sanggam Indra Permana Sianipar, SH
NIM.150.219.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.2.1 Rumusan Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Bagi Penulis	8
1.4.2 Bagi Masyarakat Umum dan Pembaca	8
1.4.3 Bagi Pemerintah	8
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual	9
1.5.1 Kerangka Teori	9
1.5.2 Kerangka Konseptual	18
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Jenis dan Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	19
1.7 Pengolahan dan Analisis Data	20
1.7.1 Pengolahan Data	20
1.7.2 Analisis Data	21
1.8 Sistematika Penulisan	21
 BAB II TINJAUAN UMUM	 23
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	23

2.2	Sejarah Hukum Kepailitan.....	24
2.3	Pengertian dan Konsep Kepailitan.....	25
2.3.1	Pengertian Kepailitan.....	25
2.3.2	Konsep Kepailitan.....	28
2.4	Harta Kepailitan.....	31
2.5	Syarat Debitor Dinyatakan Pailit.....	32
2.6	Pengurusan Harta Pailit.....	35
2.7	Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit.....	36
2.8	Tujuan dan Fungsi Kepailitan.....	41
2.9	Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan.....	42
BAB III	PEMBERESAN BOEDEL PAILIT.....	47
3.1	Prosedur Kepailitan.....	47
3.2	Hasil dan Pembahasan.....	48
3.2.1	Pemberesan Boedel Pailit Jika Harta Pailit Melebihi Jumlah Tagihan.....	48
3.2.2	Hambatan dan Penyelesaian Permasalahan.....	59
BAB IV	STATUS DEBITOR PAILIT SETELAH PEMBERESAN BOEDEL PAILIT.....	65
4.1	Prinsip Transparansi Dalam Kepailitan.....	65
4.2	Akibat Kepailitan.....	66
4.3	Hambatan dan Penyelesaian Permasalahan.....	86
BAB V	PENUTUP.....	89
5.1	Kesimpulan.....	89
5.2	Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA